



PAPER – **OPEN ACCESS**

Peran Perguruan Tinggi dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus pada UnitKegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan Universitas Teuku Umar)

Author : Afrizal Tjoetra dan Arfriani Maifizar
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.582
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Peran Perguruan Tinggi dalam Mitigasi Bencana (Studi Kasus pada Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan Universitas Teuku Umar)

*The Role of Higher Education in Disaster Mitigation (Case Study in Teuku Umar University Disaster
Management Student Activity Unit)*

Afrizal Tjoetra^a, Arfriani Maifizar^b

^{a,b}Program Studi Sosiologi – FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh 23615, Indonesia

Email: afrizaltjoetra@utu.ac.id, rian_maya@yahoo.com

Abstract

University has a strategic role in the community through its three essential services related to learning, research and community service. Regarding disaster management, Teuku Umar University has formed a Student Activity Unit of Disaster Management (UKM PK). This unit has been active in carrying out various actions during disaster management in the south west region of Aceh, especially in West Aceh District. The research objective was to find out the various efforts and obstacles of this Student Activity Unit of Disaster Management (UKM PK) while carrying out their role in disaster management. This study was conducted using qualitative methods. The research was carried out through document review and interviews with selected speakers, such as the advisor of student unit of disaster management, the Chair and Vice Chair of Disaster Management Student Unit, Disaster Management Agency of West Aceh, and a number of people who received assistance from disaster management student unit. Based on the results of the research indicated that the student activity unit of disaster management has played an active role in disaster management, especially in West Aceh. The efforts carried out comprised 4 (four) parts, namely disaster mitigation, disaster training for members of UKM PK, Building collaboration with related agencies and visiting the areas affected by the disaster. On the other hand, the obstacles face by the Student Activity Unit of Disaster Management in carrying out their roles were divided into two parts, namely internal and external Obstacles. Internal obstacles related to the lack of funding and facilities and infrastructure, regeneration, and the capacity of members and the limited time of members in handling disasters that often arise unexpectedly, while external barriers were related to the community's willingness to mitigate and manage disasters sustainably.

Keywords: Community, Higher Education, Disaster Management, Student Activity Unit Capitalize;

Abstrak

Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam masyarakat melalui tridarmanya berkaitan dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengenai penanggulangan bencana, Universitas Teuku Umar telah membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan (UKM PK). UKM PK telah aktif melakukan berbagai aksinya saat penanggulangan bencana di kawasan barat selatan Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai upaya dan hambatan UKM selama melaksanakan perannya dalam penanggulangan bencana. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan melalui kajian dokumen dan wawancara dengan beberapa narasumber terpilih, seperti Pembina UKM PK, Ketua dan Wakil Ketua UKM PK, unsur Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat, serta sejumlah masyarakat yang menerima manfaat saat UKM PK melakukan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UKM PK telah berperan aktif dalam penanggulangan bencana khususnya di Aceh Barat. Upaya-upaya yang dilakukan terdiri dari 4 (empat)

bagian, yaitu mitigasi bencana, pelatihan kebencanaan bagi anggota UKM-PK, membangun kerjasama dengan instansi terkait serta terjun lapangan pada lokasi bencana. Sedangkan hambatan UKM PK dalam melaksanakan perannya dibagi dalam dua bagian, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terkait minimnya pendanaan serta sarana dan prasarana, kaderisasi, serta kapasitas anggota dan keterbatasan waktu anggota dalam penanganan bencana yang sering muncul tak terduga. Sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan kesediaan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Masyarakat, Perguruan Tinggi, Penanggulangan Bencana, Unit Kegiatan Mahasiswa;

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang rawan bencana. Bencana alam maupun sosial dapat terjadi dalam waktu yang tak terduga, terutama di daerah yang berada dalam kawasan cincin api (*ring of fire*). Selain itu, terdapat sejumlah negara lainnya yang juga termasuk dalam area ini diantaranya Selandia Baru, Filipina, Jepang, Alaska, Meksiko, Guatemala. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rahmat Triyono (Kepala Pusat Gempa Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada Okezone, Selasa 9 Oktober 2018, “bahwa daerah yang berada dalam kawasan *ring of fire* memiliki potensi gempa, tsunami dan aktifnya gunung-gunung berapi [1].

Selanjutnya, mengutip Okezone, 13 Oktober 2018 diketahui bahwa sepanjang 2018 terdapat lima daerah di Indonesia dilanda gempa besar. Misalnya gempa 6,1 SR di Banten pada 23 Januari 2018. Kemudian gempa Banjarnegara, Solok, Lombok hingga lindu menggoyang Sulawesi Tengah disusul gelombang tsunami pada 28 September.

Mengacu penanganan pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 serta sejumlah bencana lainnya di Nusantara, diketahui sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku pasar serta Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk membantu masyarakat di wilayah bencana. Sejumlah upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat berlangsung pada masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tak langsung melibatkan masyarakat secara luas, termasuk lembaga pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi melalui tridarmanya memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, terutama berkaitan dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut berlangsung dengan partisipasi aktif dosen dan mahasiswa melalui berbagai program dan kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.

Universitas Teuku Umar merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) yang berada di Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah di barat selatan Aceh yang sering mengalami bencana alam, seperti banjir dan kebakaran lahan. Untuk itu, Universitas Teuku Umar terus berikhtiar guna memastikan perannya dalam penanganan bencana. Walaupun belum terlibat aktif selama penanganan pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh, namun sejumlah dosen dan mahasiswa telah memulainya dengan agenda yang terbatas. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan dengan membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan (UKM PK) pada tahun 2016. UKM ini telah aktif melakukan berbagai aksinya saat peristiwa bencana di kawasan barat selatan Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai upaya dan hambatan UKM PK selama melaksanakan perannya dalam penanggulangan bencana.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merujuk tiga konsep utama, yakni bencana, mitigasi bencana, serta peran perguruan tinggi sebagaimana uraian berikut ini :

2.1. Definisi Bencana

Adapun definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (UU PB) dikemukakan sebagai “suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi”.

Merujuk uraian di atas, pemahaman tentang bencana setidaknya mengandung tiga aspek utama, yaitu :

- a. Terjadinya peristiwa atau gangguan terhadap kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Peristiwa atau gangguan tersebut membahayakan kehidupan dan fungsi dari masyarakat yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.
- c. Mengakibatkan korban dalam jumlah tertentu dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sesuai sumber daya dari masyarakat korban bencana tersebut.

Selanjutnya, bencana dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Hal ini sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia [2] dengan uraian ringkas sebagai berikut:

- a. Bencana Alam: Bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, gunung meletus dan kekeringan.
- b. Bencana Non Alam: Bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa non alam seperti epidemi dan wabah penyakit, gagal modernisasi, dan kegagalan teknologi.
- c. Bencana Sosial: Bencana yang terjadi akibat serangkaian peristiwa ulah/intervensi manusia dalam beraktifitas yang meliputi teror dan konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas.

Mengacu Himpunan [3] diketahui bahwa semakin besar bencana terjadi maka kerugian akan semakin besar apabila manusia, lingkungan, dan infrastruktur semakin rentan. Selanjutnya, jika terjadi setiap bahaya (*hazard*), tetapi masyarakat tidak rentan, maka masyarakat tersebut dapat mengatasi masalah sendiri peristiwa yang mengganggu. Berikutnya, apabila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam, maka tidak akan terjadi bencana.

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PB, 2002) dalam arahan kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia menyatakan bahwa tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila ‘bahaya’ terjadi pada ‘kondisi rentan’. Berikutnya, BAKORNAS PB memaknai ancaman atau bahaya sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan menimbulkan dampak suatu kondisi yang ditentukan oleh psikologis. Hubungan ancaman (bahaya) dan kerentanan merupakan perpaduan antara ancaman + kerentanan = bencana.

Merujuk UU PB dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi [4] :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

2.2. Mitigasi Bencana

Mitigasi atau mitigasi bencana dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini dapat dilihat dalam UU PB serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP Penanggulangan Bencana) [5]. Berikutnya, dalam Pasal 20 Ayat (1) PP Penanggulangan Bencana menetapkan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Selanjutnya, PP Penanggulangan Bencana dalam Pasal 20 Ayat (2) mengatur bahwa kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui:

- a) perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
- b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

2.3. Peran Perguruan Tinggi

Makna peran dapat dipahami melalui berbagai pendapat para ahli, antara lain berdasarkan Miftah Thoha [6] yang mengatakan bahwa konsep peran didefinisikan sebagai satu rangkaian perilaku yang diharapkan oleh seseorang. Selanjutnya, Thoha dalam Tjoetra (2017) bahwa konsep peran diambil dari proses yang terjadi pada panggung teater guna menjelaskan apa saja yang dapat dilakoni oleh seorang artis. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam sebuah organisasi maka makna peran berhubungan dengan pemahaman atau perpaduan antara tujuan dan misi organisasi [7].

Berikutnya, Narwoko [8] memaknai peran sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Status dan peran saling berkaitan. Jika seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Seterusnya, Narwoko (2004:138-139) mengatakan bahwa suatu peran sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) hal, yakni:

- a) meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b) suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat.
- c) dimaknai sebagai perilaku seseorang yang penting terhadap struktur sosial masyarakat.

Dengan demikian, sesuai uraian para ahli tersebut maka peran dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku yang dilakukan secara individu atau seseorang sesuai status sosialnya maupun dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi tertentu untuk kepentingannya maupun pengembangan masyarakat.

Definisi Perguruan Tinggi dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Perguruan Tinggi (UU PT). Berdasarkan UU PT Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Berikutnya, UU PT dalam Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa “Pendidikan Tinggi dinyatakan sebagai jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.

Selanjutnya, dalam UU PT juga menerangkan mengenai peran strategis pendidikan tinggi dalam pembangunan. Hal ini dapat diketahui pada salah satu konsideran UU PT yaitu “pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan”.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007) [9] diterjemahkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian dilaksanakan melalui kajian dokumen dan wawancara dengan beberapa narasumber terpilih, seperti unsur UKM PK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak Januari – Maret 2019 dengan cakupan wilayah Aceh Barat sebagai salah satu bagian wilayah kerja UKM PK. Narasumber yang ditetapkan sebanyak 6 orang, terdiri dari Pembina UKM PK, Ketua dan Wakil Ketua UKM PK periode 2019, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta 2 (dua) orang masyarakat sebagai penerima manfaat UKM PK saat penanganan bencana di Aceh Barat.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan selama penelitian diuraikan dalam dua bagian, yakni upaya yang dilakukan Universitas Teuku Umar melalui UKM PK dalam penanggulangan bencana serta hambatan UKM PK dalam melaksanakan perannya. Adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut :

4.1. Upaya UKM PK dalam Penanggulangan Bencana

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang sudah ditetapkan, diketahui bahwa UKM PK telah aktif dalam penanggulangan bencana sejak awal inisiatif pembentukannya tahun 2016 lalu [10]. Sedangkan pengesahan pembentukan UKM PK secara formal dilakukan pada tahun 2017. Selanjutnya, Irsadi mengatakan bahwa latar belakang pembentukan UKM PK karena situasi dan kondisi Aceh Barat khususnya dan umumnya barat selatan Aceh yang sering dilanda bencana, seperti banjir dan pembakaran lahan. “Apalagi, sejumlah kampus di Aceh belum ada yang namanya penanggulangan kebencanaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan”, ungkap Irsadi. Selanjutnya, Irsadi juga mengatakan bahwa kelembagaan yang sama baru dibentuk pada tiga kampus, yakni di Universitas Indonesia (dengan sebutan UKM Mitigasi Bencana), UTU (UKM PK), serta Universitas Andalas (tergabung dalam Mapala UNAND dalam Divisi Kebencanaan) [11].

Sesuai dokumen laporan UKM PK serta wawancara dengan Ketua UKM PK diketahui bahwa sejak awal pembentukan telah berjalan sesuai dengan tujuannya.. Adapun tujuan pembentukan UKM PK, yaitu [12] :

- a) Membentuk karakter masyarakat, mahasiswa yang peduli dan tangkap terhadap bencana, khususnya bencana alam yang terjadi di sekitar barat selatan
- b) Menumbuhkembangkan rasa kepedulian kepada sesama manusia yang saling membutuhkan ketika mengalami bencana.
- c) Peduli terhadap mitigasi bencana yang terjadi disekitar kita, diharapkan kepedulian ini berdampak pada pengetahuan dan pemahaman akan kesadaran terhadap perlunya mitigasi bencana.
- d) Sebagai wadah segumpal prestasi yang ada di univesitas, pembentukan UKM PK ini selaras dengan tujuan dalam memberi ruang bagi mahasiswa dalam mengasah potensi sosial, khususnya mengenai kemampuan menanggulangi bencana secara cepat dan tepat.
- e) Membentuk karakter mahasiswa yang peduli sesama, kepada lingkungan dan kepada kondisi kondisi yang terjadi disekitarnya khususnya yang berada disekitar barat selatan Aceh.

UKM PK telah ikutserta dalam penanggulangan bencana pada 4 (empat) lokasi bencana. Selama pelaksanaan perannya, UKM PK mendapatkan dukungan masyarakat, antara lain saat penanganan bencana Gampong Blang Beurandang, wilayah Woyla Barat, wilayah Woyla Timur, dan Gampong Pasi Mesjid [13].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina, Ketua dan Wakil Ketua Pengurus UKM PK 2019 diketahui bahwa telah dilakukan sejumlah kegiatan dalam penanggulangan bencana di Aceh Barat. Pengurus UKM PK periode 2017 – 2019 telah melakukan perannya dalam penanggulangan bencana melalui 4 (empat) program dan kegiatan, yaitu:

- a) Mitigasi bencana yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat dan sekolah. Program sosialisasi kebencanaan ini memberikan dampak yang baik dalam pemahaman serta pengetahuan yang memadai dari masyarakat maupun pihak sekolah terhadap penanggulangan bencana.
- b) Pelatihan kebencanaan bagi anggota UKM-PK. Pelatihan ini bertujuan dalam membentuk peran dari mahasiswa secara aktif dalam penanggulangan bencana dan memiliki skill serta pengetahuan terhadap langkah-langkah strategi dalam penanggulangan bencana.
- c) Kerjasama dengan instansi: BPBD Aceh Barat, SAR Aceh Barat, Basarnas Aceh Barat, PT. MIFA Bersaudara, PMI Aceh Barat, DLHK Aceh Barat, KPH IV Aceh Barat, Dinas Sosial Aceh Barat. Kerjasama yang intens terjadi antara UKM PK dengan instansi terkait seperti di utarakan diatas menjadikan proses penanggulangan bencana berjalan lancar dan tepat sasaran. Kerjasama yang harmonis ini terus berlanjut sejak pembentukan UKM PK sampai saat ini.
- d) Terjun Lapangan pada lokasi bencana. Ritme waktu yang tidak terduga terjadinya bencana menuntut peran aktif dari pengurus UKM PK secara sigap menangani bencana dengan turun secara langsung ke lokasi bencana.

Berikutnya, dukungan dan kerjasama juga diharapkan pada BPBD Aceh Barat serta kabupaten/kota di kawasan barat selatan Aceh. Dukungan dan kerjasama selama ini dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas anggota UKM PK termasuk penyediaan sejumlah peralatan UKM-PK ketika melaksanakan penanggulangan bencana. “Selama ini, kerjasama BPBD Aceh Barat dengan UKM PK dalam bentuk koordinasi dan penanganan bencana secara bersama. BPBD Aceh Barat turut mendukung UKM PK dengan penyediaan sejumlah sarana dan prasarana”, ungkap Kepala Seksi Program BPBD Aceh Barat [14]. Harapannya, UKM PK lebih aktif dalam membangun koordinasi serta aktif dalam sejumlah pertemuan dengan *stakeholder* guna memaksimalkan perannya dalam penanganan bencana.

Sedangkan masyarakat di sekitar bencana mengatakan bahwa “UKM PK aktif dalam penanganan bencana, namun masih biasa saja. Dan walaupun memberikan bantuan juga masih standar dalam bentuk membantu hal-hal yang diperlukan, termasuk bantuan makanan”, ujar Warni dari kawasan Blang Beurandang [15]. Hal senada juga disampaikan oleh Zikra Balqis mengenai peran UKM PK dalam penanggulangan bencana. Hanya saja, Zikra Balqis memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan UKM PK selama penanggulangan bencana [16]. Selanjutnya, Warni dan Zikra Balqis menyampaikan harapan agar UKM PK semakin aktif atau cepat tanggap dalam melaksanakan perannya sebagai UKM yang bergerak dalam bidang penanggulangan kebencanaan.

Merujuk pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan mengenai peran Perguruan Tinggi dalam masyarakat--khususnya penanggulangan bencana, dapat dinyatakan Universitas Teuku Umar melalui UKM PK telah melaksanakan perannya di Kabupaten Aceh Barat bersama dengan BPBD Aceh Barat, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Peran Universitas Teuku Umar dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pembentukan UKM PK, dukungan legal formal terhadap UKM PK, pengorganisasian serta kaderisasi, peningkatan kapasitas, membangun kerjasama dengan para pihak, serta penanganan penanggulangan bencana dalam masyarakat. Hanya saja, jika dikaitkan dalam proses mitigasi bencana maka Universitas Teuku Umar melalui UKM PK belum melaksanakannya secara keseluruhan. Proses yang dilaksanakan hingga 2019 berkisar pada “penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern”.

Sedangkan mengenai agenda “perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana dan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan” belum dilakukan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kedua agenda dimaksud sangat berhubungan erat dengan tugas dan wewenang instansi pemerintahan kabupaten hingga nasional. Apalagi, pelaksanaan kedua agenda tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia, dana serta kebijakan dari pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat secara sehingga memberi dampak perubahan kebijakan dan perilaku secara luas serta berkelanjutan.

4.2. Hambatan UKM PK dalam Penanggulangan Bencana

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus UKM PK UTU periode 2019 diketahui sejumlah hambatan dalam pelaksanaan perannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terkait dengan minimnya dana dalam melakukan kegiatan. Dampaknya kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan seperti *rabort bot*, tenda pengungsian, mobil angkutan. Selain itu, karena anggota UKM PK terdiri dari mahasiswa/i maka pengelolaan waktu menjadi hambatan tersendiri. Mengingat sebagai mahasiswa juga harus mengikuti jadwal kuliah atau ujian sesuai waktu yang telah ditetapkan. Apalagi jika dikaitkan dengan peristiwa bencana yang seringkali tak terduga sehingga menyulitkan anggota UKM PK untuk aktif dalam penanggulangan bencana. Dan, hambatan lainnya berkaitan dengan minimnya pengetahuan sebagian anggota UKM-PK terhadap bencana.

Hambatan eksternal berkaitan dengan kesediaan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku dalam membuang sampah pada tempatnya serta proses perluasan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan. Dampaknya saluran air yang tersumbat serta tantangan dalam penanggulangan luasan lahan yang terbakar.

Dengan segala keterbatasannya, Pengurus UKM PK mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar mampu berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana. Harapan dan dukungan diharapkan kepada kampus, mahasiswa, BPBD, serta masyarakat. Dukungan dari kampus dalam bentuk pemenuhan dana dan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan UKM PK. Selain itu, memastikan perluasan dukungan mahasiswa melalui partisipasi aktif dalam

kegiatan kebencanaan.

Berikutnya, Pengurus UKM PK mengharapkan agar masyarakat di kawasan barat selatan Aceh saling dukung dan kerjasama dalam bentuk mitigasi dan penanggulangan bencana. Dengan demikian, peran serta UKM PK pada masa yang akan datang dapat lebih baik, lebih tanggap, serta siap siaga terhadap bencana sehingga bermanfaat bagi masyarakat [17]. Harapan ini tentu saja menjadi tantangan bersama antara Pengurus UKM PK dengan civitas akademika Universitas Teuku Umar untuk memantapkan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk merespon hambatan internal dan eksternal yang terjadi di UKM PK dalam penanggulangan bencana diperlukan koordinasi dan kerjasama intra Universitas Teuku Umar. Sejumlah agenda penting dan strategis yang dapat dilakukan secara internal dalam hal berkenaan pengelolaan organisasi dan peningkatan kapasitas kader. Sedangkan hambatan eksternal dapat didukung dengan perluasan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana.

Walaupun demikian, UKM PK telah mendapat dukungan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Bentuk dukungan yang diberikan kepada Pengurus UKM PK selama ini diwujudkan melalui jalinan kerjasama dengan para pihak serta partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

- a) Upaya-upaya yang dilakukan UKM PK dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui 4 (empat) bagian, yaitu mitigasi bencana, pelatihan kebencanaan bagi anggota UKM PK, membangun kerjasama dengan dengan instansi terkait seperti BPBD Aceh Barat, SAR Aceh Barat, Basarnas Aceh Barat, PT. MIFA Bersaudara, PMI Aceh Barat, DLHK Aceh Barat, DKH Aceh Barat, Dinas Sosial Aceh Barat, serta terjun lapangan pada lokasi bencana. Sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Teuku Umar, UKM PK telah berperan aktif dalam penanggulangan bencana di kawasan barat selatan Aceh serta telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi terutama dalam hal pengabdian masyarakat.
- b) Sejumlah hambatan yang dihadapi UKM PK dalam melaksanakan perannya dibagi dalam dua bagian, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi minimnya pendanaan serta sarana dan prasarana, kaderisasi, serta kapasitas anggota dan keterbatasan waktu anggota dalam penanggulangan bencana yang sering muncul tak terduga. Keterbatasan waktu dimaksud apabila peristiwa bencana bersesuaian dengan keperluan anggota sebagai mahasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti jadwal kuliah serta ujian sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan hambatan eksternal berkaitan dengan kesediaan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana secara berkelanjutan. Misalnya saja berkenaan dengan perilaku membuang sampah pada tempatnya serta kesediaan melaksanakan penataan ruang berdasarkan analisis risiko bencana.

Sedangkan saran-saran yang dapat disampaikan antara lain :

- a) Universitas Teuku Umar; terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana di kawasan barat selatan Aceh, khususnya di Aceh Barat. Selain itu, memberikan dukungan pembinaan secara berkelanjutan kepada Pengurus dan Anggota UKM PK agar dapat melaksanakan perannya secara baik pada masa yang akan datang.
- b) Mahasiswa; berpartisipasi aktif sebagai anggota UKM PK atau menjadi bagian penting dalam penanganan bencana di kawasan barat selatan Aceh, khususnya wilayah Aceh Barat.
- c) Pemerintah Aceh Barat; meningkatkan perannya melalui pembentukan kebijakan serta penataan ruang berdasarkan analisis risiko bencana, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
- d) BPBD Aceh Barat: turut serta mendukung pengembangan kapasitas kader serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan UKM PK dalam penanggulangan bencana, baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun rekonstruksi pasca bencana.
- e) Masyarakat; selalu berpartisipasi aktif serta mendukung UKM PK dalam pencegahan, penanganan maupun rekonstruksi pasca bencana.

Ucapan Terima Kasih

Kami sampaikan bahwa penelitian ini masih belum sempurna karena berbagai keterbatasan. Namun, sesuai hasilnya kami haturkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi informasi selama pelaksanaan penelitian. Berikutnya, secara khusus kami haturkan terima kasih kepada Pengurus UKM PK UTU yang telah berperan aktif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada LPPM-PM UTU, Dekan FISIP UTU, serta Rektor yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian dan kesempatan untuk mengikuti Konferensi APSSI VIII di Medan, Sumatera Utara.

Referensi

- [1] Anonim, *Dikepung Cincin Api, Ini Titik-Titik Rawan Gempa*, Indonesia: Okezone, 2019.
- [2] L. Kurniawan, S. Triutomo, R. Yunus, M. Robi Amri and A. Ari Hantyanto, *Indeks Risiko Bencana Indonesia*, Citeurup - Sentul, Jawa Barat: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013.
- [3] H. Gigih, "Penyebab Tetap Bermukimnya Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu," Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Pembangunan Wilayah dan kota Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- [4] Anonim, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf, Jakarta, 2007.
- [5] Anonim, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Jakarta: BNPB.go.id, 2008.
- [6] M. Thoaha, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- [7] A. Tjoetra, "Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil dan Kelesetarian Perdamaian di Aceh, Indonesia," Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang - Malaysia, 2017.
- [8] J. D. Narwoko and B. S. , *Sosilogi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- [9] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- [10] I. Aristora, Interviewee, *Pembina UKM PK UTU*. [Interview]. 14 Maret 2019.
- [11] I. Aristora, Interviewee, *Pembina UKM PK UTU*. [Interview]. 15 Maret 2019.
- [12] I. Oktofiandi, Interviewee, *Ketua UKM PK*. [Interview]. 14 Maret 2019.
- [13] R. Nita, Interviewee, *Wakil Ketua UKM PK*. [Interview]. 14 Maret 2019.
- [14] Darmawan, Interviewee, *Kepala Seksi Program Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat*. [Interview]. 14 Maret 2019.
- [15] Warni, Interviewee, *Masyarakat*. [Interview]. 15 Maret 2019.
- [16] Z. Balqis, Interviewee, *Masyarakat*. [Interview]. 15 Maret 2019.
- [17] N. Rahma, Interviewee, *Wakil Ketua UKM PK UTU*. [Interview]. 14 Maret 2019.